PENGARUH TRADISI KRITIK BARAT DAN *ASIAN VALUES* DALAM MEMBENTUK TRADISI KRITIK INDONESIA

Rangga Saptya Mohamad Permana¹, Undang Ahmad Darsa², Elis Suryani Nani Sumarlina³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: ¹rangga.saptya@unpad.ac.id, ²undang.a.darsa@unpad.ac.id, ³elis.suryani@unpad.ac.id

ABSTRAK. Tradisi kritik mulai tumbuh dan berkembang pada masa Pencerahan (*Enlightenment era*) di Eropa. Era Pencerahan membawa perubahan pemikiran manusia menjadi lebih logis, sistematis dan kritis. Pencerahan meletakkan landasan intelektual bagi tradisi kritik Barat dengan mengedepankan nalar, individualisme, hak asasi manusia, dan komitmen terhadap penyelidikan empiris. Jauh setelah itu, pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memberlakukan "*Asian values*" ("nilai-nilai Asia") yang coba diimplementasikan melalui Pancasila. *Asian values*-lah yang membentuk tradisi kritik khas Indonesia yang muncul pada masa Orde Baru. Melalui kajian ini, penulis ingin mengemukakan bahwa terdapat dua konsep yang memengaruhi tradisi kritik di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi kritik Barat dan *Asian values* memengaruhi terbentuknya tradisi kritik Indonesia yang kita kenal sekarang. Penulis menggunakan metode kajian literatur dalam artikel ini. Penulis mengumpulkan berbagai referensi, mulai dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, hingga sumber-sumber referensi yang berasal dari internet. Seluruh sumber tersebut mencakup konsep-konsep mengenai kritik secara umum, tradisi kritik Barat, *Asian values* dan referensi-referensi lain yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dualisme tradisi yang memengaruhi tradisi kritik Indonesia, yaitu tradisi kritik Barat yang ciri-cirinya dipengaruhi era Pencerahan di Eropa dan tradisi kritik yang dipengaruhi *Asian values* dan otoritarianisme. Di satu sisi, sejumlah kritikus dan budayawan Indonesia cenderung menggunakan cara kritik Barat yang lahir dari era Pencerahan dalam karya-karya yang mereka hasilkan. Di sisi lain, *Asian values* juga memegang peranan penting dan memiliki pengaruh besar dalam terbentuknya tradisi kritik Indonesia yang bersifat tidak langsung dan mengedepankan harmoni.

Kata-kata Kunci: Tradisi kritik Barat; *Asian values*; tradisi kritik Indonesia; Syuman Jaya; Utuy Tatang Sontani

THE INFLUENCE OF THE WESTERN CRITICAL TRADITION AND ASIAN VALUES IN FORMING THE INDONESIAN CRITICAL TRADITION

ABSTRACT. The tradition of critique developed during the Enlightenment era in Europe. The Enlightenment made thinking more logical, systematic, and critical. The Enlightenment promoted reason, individualism, human rights, and empirical investigation, laying the groundwork for Western critical thought. Later, during the New Order, Indonesia strove to implement "Asian values" through Pancasila. Asian values created the New Order-era Indonesian critical tradition. This study argues that two concepts shape Indonesian critical tradition. This study investigates how Western critical traditions and Asian values shaped the Indonesian critical tradition. The author reviews literature in this piece. The author gathers references from books, scientific journals, research reports, and the internet. All of these sources discuss critique, Western critical traditions, Asian values, and related topics. Western critical tradition, influenced by the Enlightenment in Europe, and Asian values and authoritarianism impact the Indonesian critical tradition. Many Indonesian critics and cultural figures adopt Enlightenment-era Western critical tradition in their works. Asian values also shape Indonesia's indirect, harmonious critical tradition.

Keywords: Western critical tradition; *Asian values*; Indonesian critical tradition; Syuman Jaya; Utuy Tatang Sontani

Korespondensi: Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom. Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363. Email: rangga.saptya@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Tradisi kritik mulai tumbuh dan berkembang pada masa Pencerahan (*Enlightenment era*) di Eropa. Era Pencerahan membawa perubahan pemikiran manusia. Manusia sudah mulai menggunakan akal dan logika untuk menganalisis secara kritis segala kejadian. Konsekuensinya, individu saat ini

mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri (Kartodirdjo, 1986). Rasionalitas, sains, pemikiran kritis, dan kebebasan dari dogma agama dan kekuasaan feodal merangsang tradisi kritik Barat pada masa Pencerahan. Kritik kemudian "melarikan diri" dari gereja dan pemerintahan feodal. Seni, sastra, filsafat, agama, politik, dan masyarakat dikritik secara rasional dan obyektif. Pencerahan

meletakkan landasan intelektual bagi tradisi kritik Barat dengan mengedepankan nalar, individualisme, hak asasi manusia, dan komitmen terhadap penyelidikan empiris. Prinsip-prinsip ini terus membentuk cara individu dalam masyarakat Barat melakukan pendekatan terhadap pemeriksaan dan evaluasi gagasan, institusi, dan norma-norma masyarakat (Permana et al., 2023).

Jauh setelah itu, pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memberlakukan “*Asian values*” (“nilai-nilai Asia”) yang coba diimplementasikan melalui Pancasila. *Asian values* mengedepankan usaha keras, kepatuhan, stabilitas, kebersamaan, dan otoritas. *Asian values* dimaksudkan untuk menstabilkan politik Indonesia. Namun, penafsiran dan penerapan *Asian values* juga dapat digunakan untuk membenarkan otoritarianisme, pembatasan hak-hak sipil, dan penindasan oposisi politik. Padahal, terlalu menekankan kebersamaan dapat menghambat kebebasan berpendapat dan membatasi kebebasan individu.

Terakhir, *Asian values*-lah yang membentuk tradisi kritik khas Indonesia yang muncul pada masa Orde Baru. Selama masa ini, tradisi kritik Indonesia sering kali mengalami tekanan dan pembatasan yang dilakukan oleh rezim otoriter. Kritikus seni dan budaya seringkali kesulitan menyampaikan pemikirannya secara bebas, apalagi jika kritik tersebut ditujukan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang. Namun, tradisi kritik Indonesia juga dapat ditemukan dalam karya seni, sastra, teater, musik, dan film yang lebih substantif dan puitis. Dalam konteks ini, para seniman, budayawan, dan sineas kerap memanfaatkan karyanya untuk mengkritik ketidakadilan, korupsi, dan penindasan di masyarakat. Pada masa Orde Baru, tradisi kritik Indonesia dapat berbentuk alegori, metafora, atau simbolisme untuk menyampaikan pesan kritis secara diam-diam dan menghindari kemungkinan represi. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap menjaga kebebasan berekspresi sambil mengkritisi kondisi politik dan sosial saat ini.

Dengan demikian, Pencerahan juga telah membentuk tradisi kritik Indonesia, namun *Asian values* telah melemahkan dampak ini. Semangat Pencerahan, pemikiran rasional, pembebasan dari dogma, universalitas, dan pemikiran kritis masih memengaruhi tradisi kritik Indonesia, meski belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep dan nilai global disesuaikan dengan budaya Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian mengenai tradisi kritik Indonesia, tepatnya

mengenai pengaruh tradisi kritik Barat dan *Asian values* dalam membentuk tradisi kritik Indonesia. Melalui kajian ini, penulis ingin mengemukakan bahwa terdapat dua konsep yang memengaruhi tradisi kritik di Indonesia. Di satu sisi, sejumlah kritikus dan budayawan Indonesia cenderung menggunakan cara kritik Barat era Pencerahan dalam karya-karya yang mereka hasilkan. Penulis mencontohkan pemikiran-pemikiran kritis Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani yang diwujudkan lewat karya-karya mereka. Kedua seniman ini cukup vokal mengkritik fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang disebabkan oleh pemerintah dalam karya-karyanya yang sarat dengan kritik. Di sisi lain, *Asian values* juga memegang peranan penting dan memiliki pengaruh besar dalam terbentuknya tradisi kritik Indonesia yang bersifat tidak langsung dan mengedepankan harmoni. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi kritik Barat dan *Asian values* memengaruhi terbentuknya tradisi kritik Indonesia yang kita kenal sekarang.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kajian literatur dalam artikel ini. Penulis mengumpulkan berbagai referensi, mulai dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, hingga sumber-sumber referensi yang berasal dari internet. Seluruh sumber tersebut mencakup konsep-konsep mengenai kritik secara umum, tradisi kritik Barat, *Asian values* dan referensi-referensi lain yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Selain itu, penulis juga telah mengolah diskusi mengenai konsep kritik menurut dua seniman dan penulis kritis asal Indonesia, yaitu Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani, di mana mereka seringkali mengkritisi fenomena-fenomena sosial dan politik lewat karya-karya mereka. Diskusi mengenai pemikiran Jaya dan Sontani tersebut disarikan dari berbagai sumber.

Setelah menghimpun literatur-literatur tersebut, penulis mengkategorikannya menjadi dua bagian besar yang disesuaikan dengan bagian-bagian diskusi dalam Hasil dan Pembahasan, yakni pembahasan mengenai pengaruh tradisi kritik Barat terhadap tradisi kritik Indonesia yang direpresentasikan lewat pemikiran dan karya Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani serta pembahasan mengenai pengaruh *Asian values* dalam membentuk tradisi kritik Indonesia. Kedua bagian tersebut dikonstruksi untuk menjawab tujuan dari kajian

ini yang telah disampaikan pada bagian akhir Pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani: Tradisi Kritik Barat dalam Medium Karya

Penulis berpendapat bahwa tradisi kritik Barat mungkin memengaruhi beberapa karya Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani. Karena keterlibatan mereka dengan filosofi “kiri” pra-Orde Baru di Indonesia, para seniman ini terpengaruh oleh budaya Barat. Jaya dan Sontani menggunakan kritik Barat yang bersifat langsung dan seringkali ‘pedas’. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kritik Barat memengaruhi kritik Indonesia, terutama sebelum dan dekade pertama era Orde Baru.

Jaya dan Sontani adalah sineas dan seniman Indonesia yang kritis. Jaya, seorang sineas Indonesia, kerap mengkritik pemerintah dan fenomena sosial dalam film-filmnya, dan Sontani, seorang seniman sekaligus penulis, mengkritik pemerintah melalui sosok Kabayan dalam cerpen dan adaptasi teatralnya. Mengingat pengalaman mereka dengan komunisme, Jaya dan Sontani menggunakan aspek-aspek Barat dalam kritik mereka. Karya-karya Sontani yang penuh konflik kelas diduga terkait dengan kelompok komunis berpengaruh (PKI) di Indonesia, berbeda dengan karya Jaya yang memiliki pengalaman menuntut ilmu di Uni Soviet. Dua sub-bagian berikut menjelaskan secara singkat kedua ‘kritikus’ ini.

Syuman Jaya

Syuman Jaya adalah seorang sutradara, penulis skenario, dan aktor asal Indonesia. Lahir pada tanggal 5 Agustus 1933, di Jakarta, Jaya telah memenangkan banyak penghargaan sepanjang karirnya di bidang seni dan film. Ia meraih Piala Citra sebagai Sutradara Terbaik FFI 1977 lewat film *Si Doel Anak Modern* (1976). Selain itu, Jaya juga mendapat penghargaan yang sama lewat film *Budak Nafsu* (1983). Jaya juga menerima tiga Penghargaan Citra Kategori Cerita Asli Terbaik di FFI untuk film *Laila Majenun* (1975), *Si Doel Anak Modern*, dan *Kerikil-kerikil Tajam* (1984) (Nurillah, 2015). Jaya meninggal dunia pada 19 Juli 1985, dalam usia 51 tahun.

Festival Film Indonesia (FFI) adalah festival film tertua di Indonesia, yang sudah berlangsung sejak tahun 1955. FFI memberikan penghargaan kepada film, sutradara, aktor, aktris, dan profesional film terkemuka lainnya dalam beberapa kategori. Badan Perfilman Indonesia

(BPI) menyelenggarakan festival tersebut. FFI mempromosikan film Indonesia di dalam negeri dan internasional serta memberikan penghargaan kepada mereka yang dinilai berkontribusi dalam dunia film Indonesia.

Jaya seringkali mengkritik persoalan sosial. Dia akan mengkritik apa pun yang tidak dia yakini. Jaya mengkritik industri film Indonesia tahun 1970-an. Dekade ini merupakan dekade paling produktif di Indonesia, dengan produksi sebanyak 124 film (Agung, 2019). Jaya menganggap film-film pada masa itu hanya sekedar hiburan. Jaya mengklaim sineas Indonesia hanya membuat film yang menyenangkan. Di Indonesia, kaum borjuis mendominasi industri film. Para direktur ini tidak menekankan pengetahuan. Tulisan-tulisan Jaya di media arus utama juga meyakinkan masyarakat untuk kembali ke identitas budayanya untuk bersaing dengan budaya pop yang saat itu sedang mengambil alih kehidupan masyarakat Indonesia. Film *Si Doel Anak Betawi* tahun 1972 dan film *Si Mamad* tahun 1973 menunjukkan tradisi budaya yang kuat. Ia membahas perlawanan budaya dalam film-film tersebut.

Si Doel Anak Betawi berisi kritik Jaya terhadap modernitas yang berkembang di Jakarta. Jaya menampilkan ironi ketidakmampuan orang-orang seperti Doel mempertahankan identitasnya ketika berusaha memenuhi kriteria yang ditentukan oleh modernitas (Sasono, 2008). Sebagai orang Betawi, Jaya mengkhawatirkan warga Jakarta yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan modernitas. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan kota metropolitan Jakarta. Jaya juga menghadirkan kritik sosial modern dalam *Si Doel Anak Modern* (Chudori, 2019). Film ini mengkritik Suharto, Sang “Bapak Pembangunan”, presiden pada saat itu. Pada tahun 1970-an dan 80-an, Suharto memelopori ekspansi fisik dan modernisasi di Indonesia, yang meningkatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, terutama di kota-kota besar. Film ini secara tidak langsung mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak mengatasi kemiskinan.

Jaya selalu ingin film-filmnya menjadi inspirasi bagi penontonnya. Ia berharap penonton semakin pintar setelah menonton filmnya. Film-filmnya selalu mengandung kritik, dan ia menjadikan film-filmnya sebagai sarana penyampaian kritik sosial. Menurut Ardan (1985: 123–124), film yang merupakan debut filmnya, yakni *Lewat Tengah Malam* (1971), “membuatnya berada di bawah pengawasan ketat pemerintah pimpinan Suharto untuk mendapatkan kritik sosial.” Hanan (2017: 74) bahkan menyebut film ini sebagai “kisah Robin

Hood kontemporer yang menyoroti korupsi dan malaise di masyarakat.”

Dalam Ardanareswari (2019), Said menyatakan bahwa *Lewat Tengah Malam* menampilkan cita rasa Rusia namun sarat dengan kritik sosial khas Jaya. Fokus utam film-film Jaya ada pada tema-tema sosial menjadi ciri khasnya (Hanan, 2017: 74). Film-film Jaya mencerminkan studinya di All-Union State Institute of Cinematography di Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia). “Sekembalinya dari Rusia, Jaya menemukan bahwa bangsa Indonesia tumbuh berbeda dengan cita-cita yang mendorong revolusi. Karya pertama Jaya ‘memberontak’ dengan ‘merampok oknum pejabat’. Perampokan mendanai usaha sosial,” ujar Said (1991: 238–239). Pada saat itu, para sineas yang kritis harus menyusun pesan-pesan film mereka dengan hati-hati. Mereka harus menyembunyikan tujuan sosialnya dan berkomunikasi secara hati-hati dengan masyarakat (Imanda, 2014: 174).

Jaya menulis cerita pendek sebelum syuting. Dia suka membuat film yang diadaptasi dari cerita pendek. Jaya menggunakan film untuk mengatasi masalah sosial dan keprihatinannya terhadap pemerintah. Kritiknya yang lugas, tanpa humor, jujur, dan langsung membuat film-filmnya populer. Said (1992) mengklaim bahwa *Si Mamad* adalah kritik sosial Jaya yang paling kuat karena membahas kemiskinan di kelas bawah dan korupsi di kelas atas/birokrat. “Film ini dibuat dengan baik secara naratif dan teknis serta sangat menyentuh hati” (Said, 1992). Film ini juga mendapat penghargaan The Best Feature Film di FFI 1974. *Kerikil-kerikil Tajam* juga mengkritik sulitnya mencari pekerjaan di desa hingga memaksa perempuan bekerja di kota yang berbahaya. *Atheis* (1974) dan *Raden Ajeng Kartini* (1982) karya Jaya sama-sama membahas agama dan patriarki.

Sejak tahun 1971, film-film Jaya menampilkan gaya kritis yang menjadikannya sutradara ternama Indonesia. Film-filmnya menarik dan mendidik karena ia selalu memuat kritik sosial. *Si Mamad*, *Si Doel Anak Betawi*, dan *Si Doel Anak Modern* menyindir permasalahan masyarakat pada saat itu, yang juga sedikit-banyak masih tampak agak relevan pada zaman sekarang. Badan Sensor Film (BSF) Indonesia mengamati dengan cermat film-film Jaya, seperti *Yang Muda Yang Bercinta* (1977).

Keputusan Jaya untuk memasukkan Rendra—seorang penyair yang sangat aktif mengkritik pemerintah dalam puisi-puisinya—di film *Yang Muda Yang Bercinta*, sebuah film yang menggambarkan cinta sepasang suami istri, menarik perhatian BSF. Rendra juga

membacakan puisi yang mengkritik perjuangan kelas Indonesia dalam satu skenario. Setelah diperingatkan oleh BSF, pada akhirnya film ini diakhiri dengan kisah cinta yang mendasar dan klise, tanpa puisi radikal atau pergulatan kelas di era Orde Baru Indonesia (Sen, 2013). Contoh lainnya adalah pelarangan produksi film *Atheis*. Film tersebut dilarang diproduksi oleh Direktorat Perfilman Kementerian Penerangan Republik Indonesia karena menyisipkan dialog kontroversial. Contoh dialog yang dianggap problematis adalah sebagai berikut: “Tuhan adalah candu, itu kata Marx. Sedang bagiku, Tuhan adalah diri pribadiku.” Alasan utamanya: film tersebut dinilai dapat menimbulkan konflik agama dan menghidupkan kembali komunisme (Teguh, 2021). Janji Jaya untuk menulis ulang naskah akhirnya mendapatkan izin produksi. Setelah produksi, BSF tidak memangkas film tersebut.

Singkatnya, Jaya adalah sutradara film Indonesia yang terkenal dengan film-film kritisnya. Dia membuat semua filmnya pada masa Orde Baru Indonesia. Terlepas dari genre, film-filmnya selalu mengandung unsur kritik. Pemerintah Orde Baru melarang kritik resmi. Seperti disebutkan sebelumnya, Jaya membawa komponen-komponen kritis Barat dari studi film Sovietnya. Kelompok kiri skeptis terhadap pemerintah pada masa Orde Baru. Tradisi kritis Barat yang blak-blakan, khususnya terhadap pemerintah, dinilai sangat berbahaya di bawah pemerintahan Orde Baru Suharto.

Utuy Tatang Sontani

Utuy Tatang Sontani dikenal sebagai penulis drama sastra, penulis cerpen, dan novelis. Ia lahir di Cianjur, Jawa Barat, 31 Mei 1920 dan meninggal di Moskow, 17 September 1979. Sontani dimakamkan di Mitinskoe, kawasan Mitino, sekitar 40 kilometer dari Moskow. Karena dianggap ikut serta dalam Partai Komunis, ia tidak dapat kembali ke Indonesia. Pada masa Orde Baru, pihak berwenang memperlakukan orang-orang “kiri” dengan penuh kecurigaan dan tanpa rasa hormat. Sontani menerbitkan buku secara ekstensif pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Sontani adalah orang Indonesia pertama yang mengkritik masyarakat lewat tokoh Kabayan. *Si Kabayan* adalah sandiwarnya yang dipentaskan pada akhir tahun 1950-an. Ucapan dan tindakan Kabayan dipercaya selalu terkesan mengkritik, baik disengaja maupun tidak. Pada tahun 1959, Sontani menggunakan sosok Kabayan untuk menyampaikan kritiknya terhadap mitos dan pola konflik manusia, seksualitas, dan kelas sosial dalam salah satu

lakonnya yang berjudul *Si Kabayan* (Aveling, 1979: 26). Hal tersebut menunjukkan bahwa sosok Kabayan dapat dijadikan sebagai wahana penyampaian kritik.

Cerita tentang Kabayan dalam masyarakat Sunda sudah disampaikan secara lisan sejak abad ke-19. Mereka menggambarkan keseharian masyarakat Sunda yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Menurut Rassers dalam Adhanugraha & Putiamary (2018), Kabayan adalah tokoh yang ambigu atau memiliki sifat yang kontradiktif, seperti pintar namun malas. Selain berperan sebagai penghubung dan penyampai pesan sang pencipta, ia juga mewakili keseluruhan dan kekuatan masyarakat, baik yang bermanfaat maupun yang menghambat. Dalam setiap karyanya, tokoh Kabayan digambarkan malas namun banyak akal. Cerita Kabayan merupakan sarana penyampaian kritik terhadap kekuasaan otoritatif (Rahayu, 2016). Lebih lanjut, Rahayu (2016) mengatakan, “Kritik tersebut tercermin dari perubahan sosok Kabayan yang kerap mendapat peran sosial yang cukup esensial di masyarakat. Kabayan merupakan alat untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kesenjangan sosial”.

Naskah drama *Si Kabayan* karya Sontani diadaptasi menjadi sebuah teater oleh kelompok teater formal dari organisasi kebudayaan sayap kiri Indonesia yaitu Lembaga Seni Drama (LESDRA) pada tahun 1960an (Bodden, 2012: 465). LESDRA berada di bawah naungan Lekra (Lembaga Kedaulatan Rakyat). Seniman dan budayawan sayap kiri-lah yang membentuk Lekra. Dharta, M.S. Ashar, Henk Ngantung, Arjuna, Yubaar Ayub, Sudharnoto, dan Nyoto menciptakannya pada 17 Agustus 1950. Lekra diciptakan dan dibesarkan dalam iklim politik Indonesia, dan menarik banyak seniman. Politik mendahului budaya, menjadikan budaya bersifat politis dan medan perang. Seni dan budaya merupakan alat yang ampuh untuk menarik, mengumpulkan, dan memengaruhi masyarakat. Keberpihakan Lekra dengan masyarakat, kemampuan mengirim individu ke luar negeri untuk belajar, dan tempat berkumpulnya artis-artis papan atas menjadi daya tarik masyarakat (Suharto, 2017).

Skenario *Si Kabayan* berkisah tentang orang-orang yang berusaha mendapatkan pekerjaan secara cepat dengan sedikit usaha. Kabayan digambarkan sebagai seorang menantu yang menipu ibu mertua dan istrinya dengan bertindak sebagai utusan Nabi Hidir dan sesumbar bisa mengabulkan segala permintaan. Kabayan adalah tokoh protagonis Sontani. Dalam naskah *Si Kabayan* tahun 1959, tertulis beberapa

kritik terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada saat itu. Dalam skenario *Si Kabayan*, disebutkan beberapa orang rela mendatangi Kabayan yang dipercaya sebagai seorang dukun untuk memudahkan usaha dan mengabulkan permintaan mereka, seperti PNS yang ingin naik pangkat secara mudah, istri yang sudah tua memohon kepada suaminya agar menceraikan istri yang masih muda, dan ada seorang prajurit yang menolak dipindahkan ke bagian tempur dan ingin tetap berada di bagian perlengkapan. Pada saat Sontani menulis teks tersebut, masyarakat masih percaya pada dukun yang kuat dan seringkali meminta bantuan pada dukun agar usaha mereka berhasil dengan cara yang mudah (Adawiyah & Hartati, 2022).

Novel pendek Kabayan karya Sontani diadaptasi menjadi naskah teater. *Si Kabayan: Komedi Satu Babak* karya Sontani menampilkan budaya Sunda dan tokoh Kabayan. Inilah novel *Si Kabayan* terjemahan Sontani. Sontani berhasil menambahkan corak tersendiri pada tokoh Kabayan dari sudut pandang yang berbeda dengan cerita tradisional Kabayan (cerita rakyat yang disebut sebagai cerita rakyat anonim dalam komentar penulis). Tema novel ini adalah tentang kehidupan masyarakat Sunda pada masa penulis menulisnya, berdasarkan permasalahan dan tindakan tokoh utama serta kutipan pendukungnya. Cerita ini bersifat sarkastik atau sinis (Andanaprawira, 2016). Novel ini menyerang moralitas. Kabayan menunjukkan bahwa kita harus membedakan antara muda dan tua serta atasan dan bawahan untuk menerapkan kebenaran. Dalam kisah ini, Kabayan mengatasi hambatan tersebut untuk menemukan kebenaran dan menghukum pelaku kesalahan.

Supartono (2001) berpendapat bahwa cerita rakyat Sunda yang paling populer adalah *Si Kabayan*, tentang seorang lelaki naif dan bodoh yang melihat dunia melalui logika dan pemikirannya sendiri. Tokoh ini mengungkapkan kritik sosial masyarakat kelas bawah dengan mentalitas sederhana namun langsung pada kesulitan hidup sehari-hari. Sontani adalah orang Indonesia pertama yang mengindonesiakan dan mengadaptasi Kabayan menjadi sebuah skenario satir modern yang dapat dipentaskan. Dalam *Si Kabayan*, Sontani mengolok-olok kepercayaan mistis dan mendidik penduduk kota dalam memecahkan masalah yang tidak logis (Supartono, 2001).

Dasar pemikiran Sontani mengenai budaya kelas atas, budaya kelas bawah, konflik kelas, dan kritik di dalamnya bersumber dari teori kelas yang dikemukakan oleh Marx dan Engels (Rosidi, 1966: 78) dan pengaruh komunisme dari Uni

Soviet yang pada tahun 1950-an sedang berkembang di Indonesia. Sontani memanfaatkan sosok Kabayan untuk menyerang keyakinan agama yang simplistik dan kebodohan korup masyarakat Indonesia. Hal ini menandai awal dari komitmen publik Sontani terhadap sayap kiri. Ia juga menggunakan Kabayan sebagai “simbol kesadaran kelas pekerja yang berorientasi pada dunia nyata, bergantung pada tindakan politik, dan berkomitmen memberontak demi kesadaran hidup bermasyarakat” (Aveling, 1979: 38, 41).

Sontani menggambarkan manusia yang luwes dan bulat dengan menggunakan Kabayan. Aveling (1969) menulis: “Kritikus menganggap Sontani sebagai penulis humanis dengan karakter yang naif, polos, dan tidak hitam putih; individualis yang terasing dari masyarakat dan menganut kebebasan anarkis.” Sontani yang adaptif tampak mampu mementaskan Kabayan dengan beragam aksi dan cara pandang terhadap keberadaannya. Sontani menggambarkan Kabayan sebagai cerita rakyat Sunda yang “liar”. Penampilannya menunjukkan ingin berbagi sebagian perjuangannya dan sifat karakternya yang cenderung sombong dan protektif (Suwarna & Yusar, 2019). Suwarna dan Yusar (2019) menambahkan, “Sontani tidak mau terjebak dalam paham Lekraisme. Sontani ‘menggerakkan’ kehidupan sehari-hari yang ia pahami ke dalam arsitektur naratif yang unik dari dampak dan pesan yang diperolehnya untuk menemukan format lain dalam mengkomunikasikan Kabayannya.”

“Lompat dan berenang di tengah kerumunan” adalah langkah awal Sontani bersama *Si Kabayan*. Sontani mengikuti nasehat Lekra dengan menggabungkan tradisi-tradisi besar dengan arus revolusioner dengan menanamkan unsur-unsur cerita rakyat tradisional dengan pemahaman yang segar. Lekra dikira sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia) karena pendirinya akhirnya menjadi pemimpin PKI. Seni harus mengacu pada politik karena idealisme Lekra menjadikan politik sebagai panglima. Komunisme Lekra mempromosikan ateisme melalui seni pertunjukan rakyat (Suharto, 2017).

Bisa dibilang, Sontani meraih sukses melalui drama teater *Si Kabayan*. *Si Kabayan* adalah lakonnya yang paling banyak dipentaskan. Dari ansambel teater sekolah menengah hingga pertunjukan gedung seni profesional. Dalam pendekatan khasnya, Sontani menunjukkan bahwa solusi mistik tidaklah logis (Supartono, 2001). Jadi, dalam perspektif yang lebih luas, Sontani dapat dikatakan menggambarkan salah satu pengaruh kritik di Indonesia—gerakan

komunis global. Komunisme berbahaya dan dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 membubarkan Partai Komunis Indonesia, menyatakannya sebagai organisasi terlarang, dan melarang segala kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunis/marxis-leninisme. Pada tanggal 5 Juli 1966, Ketua MPRS Jendral TNI A.H. Nasution mengeluarkan Ketetapan XXV/1966. Larangan ini diputuskan Suharto setelah ia mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) (Isabela, 2022).

Peran *Asian Values* dalam Membentuk Tradisi Kritik Indonesia

Kritik akan semakin berdampak ketika penyampaianya diketahui banyak orang. Dampak ini menjadi positif atau menambah pengetahuan ketika kritik yang terjadi bersifat beradab. Wulandari dan Kusmarwanti (2022) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang kritik sebagai hal yang tidak diinginkan karena biasanya menunjukkan kekurangan dan keburukan orang lain. Di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakatnya masih hidup dalam budaya konteks tinggi, kritik secara langsung dan terang-terangan dianggap tidak sopan. Jadi, di Indonesia, kritik umumnya diawali dengan pujian atau ucapan terima kasih atas hal positifnya, dan pesan lainnya bersifat hiperbolik (Chandra, 2022).

Terkait dengan itu, Susetiawan (1997) berpendapat bahwa ketika kritik dilakukan secara langsung dan apa adanya tanpa mempertimbangkan budaya yang berlaku seperti di Indonesia, maka pelakunya bisa saja mendapatkan respon yang kurang baik karena mengkritik dapat dianggap bermusuhan. Penerima kritik tidak lagi memahami koreksi parsial atau kontrol orang lain atas keterbatasan pemikiran atau tindakan, baik secara individu maupun kelompok, tetapi menganggapnya sebagai kebencian. Abar (1997) menambahkan bahwa elite penguasa di era Orde Baru Indonesia sering mengatakan bahwa “Kritik boleh saja, namun harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta diungkapkan secara konstruktif.” Kalimat tersebut dapat diartikan “Mengkritik boleh saja, sepanjang tidak merusak bangunan sistem yang sudah berstatus quo.”

Sebagai gambaran besarnya, beberapa ciri umum yang dapat diamati dalam gaya kritik Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Kesopanan: Orang Indonesia terkenal sopan, terutama ketika mengkritik. Kritik sering kali diberikan dengan hati-hati dan menghormati martabat penerimanya; (2) Tidak Langsung: Orang Indonesia mungkin

menggunakan bahasa yang tidak langsung ketika mengkritik. Hal ini dapat mengurangi konflik dan perasaan sakit hati penerima kritik; (3) Harmoni: Masyarakat Indonesia lebih menghargai perdamaian dibandingkan konflik. Oleh karena itu, kritik sering kali menekankan pentingnya hubungan positif dan kerja sama; (4) Kolektivisme: Budaya Indonesia lebih mengutamakan kebutuhan kelompok dibandingkan kebutuhan individu. Oleh karena itu, kritik dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja kolektif, bukan hanya untuk pihak yang menerimanya; (5) Konstruktif: Meskipun menekankan pada sikap tidak langsung dan sopan santun, kritik dari Indonesia harus bermanfaat dan memberikan umpan balik yang spesifik untuk membantu penerimanya menjadi lebih baik. Hal ini dapat berisi saran perbaikan dan gambaran kelebihan dan kekurangan individu (Malihah, 2015), (Nasehat untuk Tinggal di Indonesia, 2023).

Penulis berpendapat masyarakat Indonesia sangat menghargai kerukunan dan kebersamaan serta menghindari konflik karena kritik yang membentuk ciri-ciri di atas. Dalam sejarahnya, pada masa terbentuknya negara Indonesia, Supomo—salah satu tokoh yang berpengaruh dalam menentukan konsep kenegaraan Indonesia—mengusulkan konsep Integralistik yang akhirnya melahirkan “Negara Kekeluargaan” atau negara yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Pengertian ini lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu (Putri, 2021). Konsep yang juga dikenal sebagai Konsep Integralistik, yang memuat nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, keseimbangan jasmani dan rohani, musyawarah, dan keadilan rakyat (Setiadi, 2018) mengharuskan segala upaya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari konflik, termasuk saat menyampaikan kritik.

Secara kultural, karakter masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keharmonisan dibentuk oleh ajaran budi pekerti yang tercermin dalam penggunaan tingkatan tuturan ketika berkomunikasi secara lisan, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan. Membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik, atau menghindari menyinggung kedua belah pihak, memerlukan penggunaan kesopanan dan etika yang baik. Hal ini sesuai dengan temuan Wajdi (2015) yang menyatakan bahwa tingkat tutur dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu tingkat tutur rendah dan tinggi. Tergantung pada siapa kita berbicara atau dengan siapa kita berbicara, kedua tingkat ini digunakan secara pragmatis dalam berbagai konteks. Tingkat rendah biasanya

digunakan ketika berbicara dengan teman dekat atau rekan kerja dalam suasana informal, sedangkan tingkat tinggi digunakan ketika berbicara dengan individu yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi dalam situasi formal. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan menjadi lebih santun seiring dengan meningkatnya level.

Selain itu, tingkat tutur bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa daerah, dan sebagian besar bahasa daerah di Indonesia (misalnya bahasa Sunda, Jawa, Bali, Sasak, dan Madura) memiliki tingkat tutur yang lebih kompleks; biasanya terdiri dari tiga hingga empat tingkat (Anderson, 1993), (Suwarno & Yanwar, 2020), (Wajdi, 2015). Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa kedua bagi sebagian besar penutur bahasa daerah di sebagian besar wilayah Indonesia (Wajdi, 2015). Sama halnya dengan tingkat tutur dalam bahasa Indonesia yang berbeda-beda berdasarkan konteks komunikasi dan individu yang diajak bicara, demikian pula tingkat tutur dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Sesuai dengan tradisi kritik Indonesia, kritikus biasanya menggunakan tingkat tutur tinggi saat menyampaikan kritik agar pihak yang dikritik tidak merasa tersinggung dan dapat menerima kritik tersebut, serta agar kegiatan kritik tersebut tidak merusak hubungan atau keharmonisan kedua pihak.

Selain kedua hal tersebut, tradisi kritik khas Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh “*Asian values*” yang muncul dari pemikiran para pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Menurut Teik (1999), para pemimpin Singapura dan Malaysia kemungkinan besar merupakan pendukung paling vokal konsep ini di Asia Tenggara. Para pemimpin Singapura dan Malaysia menggunakan istilah *Asian values* untuk menentang Barat, dengan alasan bahwa modernisasi tidak sama dengan Westernisasi. Lebih lanjut, Vickers & Fisher (1999) berpendapat bahwa partisipasi dalam konsep *Asian values* terutama dimotivasi oleh kepentingan nasional. Bukan hanya kelompok skeptis di Barat, namun juga “para pembangkang” di Asia telah mengeluh bahwa mempromosikan *Asian values* sebagai alternatif terhadap liberalisme Barat adalah metode yang berguna untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia. “Mereka yang menentang *Asian values* menganggap istilah ini sebagai alat rezim untuk mengontrol warganya melalui pengingkaran terhadap fundamental masyarakat sipil. Seperti konsep penting lainnya, *Asian values* dapat digunakan untuk membedakan mereka yang

digambarkan sebagai ‘orang luar’ dengan sebuah wacana.” (Vickers & Fisher, 1999).

Pada dekade 80-an dan 90-an, Suharto memerintah Indonesia pada masa Orde Baru. Suharto bukanlah satu-satunya pemimpin Asia yang diketahui menggunakan *Asian values* sebagai alat politik. Para pemimpin ASEAN memperdebatkan *Asian values* pada tahun 1990-an untuk mengimbangi penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia global (Hasanah, 2019). Konfusianisme, yang berasal dari Asia Timur, merupakan kontributor utama *Asian values*, yang mengedepankan keharmonisan masyarakat demi kebaikan bersama, setia dan menghormati pemimpin, serta mudah beradaptasi dengan ide-ide baru (Freeman, 1996).

Asian values terkait erat dengan norma-norma hak asasi manusia. Pada era Suharto di Indonesia, kaitan antara *Asian values* dan norma-norma hak asasi manusia berkaitan dengan batasan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berserikat, serta hak-hak sipil dan politik. Selain pengerahan instrumen militer, wacana besar-besaran mengenai nilai-nilai kebangsaan juga dilakukan. Di Indonesia, *Asian values* dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah menjaga gotong royong (Vickers & Fisher, 1999). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui program Pedoman Pemahaman dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diajarkan di sekolah, birokrasi pemerintah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kepentingan politik rezim (Hasanah, 2019). Untuk mewujudkan dan memelihara negara yang kokoh dalam suasana gotong royong, salah satu asas Pancasila adalah menghindari konflik atau pertikaian antara pemerintah yang berkuasa dengan pihak oposisi (Ulum & Hamida, 2018).

Menurut Khrisna Sen, dalam Abdulsalam (2017), legitimasi, baik sebagai presiden maupun jenderal militer, penting bagi Suharto karena pada akhir tahun 1970-an mahasiswa mulai mengkritiknya dengan serius. Selain itu, kritik terhadap pemerintahan Suharto juga cukup meluas dari kalangan militer. Pada tahun 1984 pemerintah memproduksi film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film ini menceritakan peristiwa Gerakan 30 September dan langsung menjebak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya sebagai satu-satunya dalang peristiwa tersebut. Film ini selalu ditayangkan setiap malam tanggal 30 September melalui televisi.

Gerakan 30 September/PKI merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia, di mana para anggota dan simpatisan

PKI melakukan upaya kudeta terhadap presiden pertama Indonesia, Sukarno. Mereka mengambil alih sejumlah pos strategis, termasuk markas Komando Strategis Angkatan Darat. Namun upaya kudeta ini akhirnya gagal dan disusul dengan meluasnya gerakan anti PKI dan anti komunisme di seluruh Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pimpinan Suharto kemudian mengambil tindakan tegas dengan menumpas PKI dan anggotanya sehingga menimbulkan tragedi besar yang menewaskan ratusan ribu orang (Kristina, 2021).

Pada masa Suharto berkuasa, kebebasan berpendapat dan berserikat sangat berkurang, dan partai-partai politik digabung untuk menghentikan oposisi (Heryanto & Hadiz, 2005). Pancasila merupakan ideologi utama Orde Baru untuk mempersatukan bangsa. “Pancasila berasal dari *Asian values* Indonesia yang menekankan kesadaran sosial dan persatuan. Ini adalah strategi terbaik untuk mempromosikan Orde Baru, yang menekankan kontrol pemerintah terhadap masyarakat untuk mendukung pemimpinya. Jaminan kesejahteraan sosial dan ekonomi membenarkan otoritarianisme Suharto, dengan dalih “untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.” (Robison, 1996)

Kontrol sosial yang ketat pada masa Orde Baru juga membatasi demokrasi media. Banyak fenomena yang menekan media cetak dan elektronik di bawah pemerintahan Suharto. Berita yang bersifat kritis terhadap pemerintah dilarang (Mukhaer, 2021). Pada saat itu, media massa apa pun (film, televisi, radio, surat kabar, majalah, atau media luar ruang) yang mengkritik pemerintah akan dilarang atau dibubarkan oleh pemerintah, bahkan bisa menutup kantor/lembaga media massa tersebut atau mengirim kru televisi/jurnalis/penyiar ke penjara. 12 surat kabar ditutup dan jurnalis dipenjara tanpa pengadilan pada pertengahan tahun 1970-an. Hal ini mendorong media untuk melakukan sensor mandiri (Editor Indonesia Investments, 2015).

Situasi ini berdampak pada sektor perfilman yang merupakan salah satu bentuk media massa. Hanan (2010) menambahkan, “Pada periode ini, sinema menjadi sasaran pra-sensor dan berbagai jenis represi institusional dan semi-institusional.” Aturan sensor tahun 1977 terdiri dari dua puluh empat kriteria, salah satunya adalah seks dan kekerasan (Imanda, 2014: 174). Lebih lanjut, Sen (1994: 70) berpendapat, “Pada tahun 1980, peraturan sensor telah menjadi spesifik, komprehensif, dan bersifat publik, mendorong sensor mandiri dalam industri film dan mengatur sensor pemerintah yang semakin

tidak dikontrol oleh karyawannya.” Dengan kata lain, sensor adalah “alat” pemerintahan otoriter untuk membungkam kritik. Sutradara menghindari sensor dan pembatalan dengan membuat film yang “aman”.

Selain itu, kebebasan yang terbatas ini juga berdampak pada industri film Indonesia secara umum. Era industri film Indonesia di era Orde Lama, Orde Baru, dan pasca-Reformasi bertepatan dengan pergantian rezim sejak kemerdekaan (Hanan, 2017). Jika produksi film sebelum tahun 1998 berada di bawah kendali negara dan dijalankan melalui ekonomi budaya sinema nasional, maka setelah tahun 1998 film diintegrasikan dengan mode budaya pop yang berlaku (Barker, 2011). Film juga tidak lepas dari cengkeraman kekuasaan di Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Presiden Sukarno memboikot film-film produksi Amerika Serikat (AS) agar bisa masuk ke Indonesia. Hari-hari itu berakhir ketika Suharto menjabat sebagai presiden pada Maret 1967. Krishna Sen, dalam *Sinema Indonesia: Membingkai Orde Baru*, mencatat bahwa pada tahun 1967 tidak kurang dari 400 film Amerika yang diimpor. Dekade berikutnya industri film di Indonesia menjelma menjadi monopoli keluarga Suharto (Abdulsalam, 2017).

Menurut Sen, dalam Barker (2011), rezim Orde Baru mengendalikan seluruh produksi film, terkadang secara langsung. Film ini menerapkan filosofinya pada plot sinema, khususnya narasi “kembali ke ketertiban”. Karena keterbatasan kebebasan berpendapat, industri film Indonesia mungkin berada pada titik terendah. Parahita (2022) berpendapat hanya satu hal yang dilarang: film yang mengandung unsur kritik terhadap pemerintah dan organnya. Joris (2012: 86) menginformasikan, “Setiap orang yang terlibat dalam produksi film—mulai dari asisten kamera hingga aktor utama—harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pada masa Orde Baru. Sensor diikuti. Seks, kekerasan, dan topik apa pun yang dianggap membahayakan persatuan nasional oleh pemerintah dilarang. Setiap naskah dan film harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum pengambilan gambar dan rilis.”

SIMPULAN

Karena kritik cenderung langsung dan keras, maka tipe pertama yang diusung Syuman Jaya dan Utuy Tatang Sontani bernuansa tradisi kritis Barat. Tradisi kritik Barat secara tidak langsung memengaruhi tradisi kritik Indonesia. Tradisi kedua adalah tradisi kritik yang

mencerminkan *Asian values* pada masa Orde Baru, sehingga kritik cenderung tidak langsung dan mengedepankan keharmonisan—dengan kata lain, berusaha untuk tidak menyampaikan kritik secara terbuka agar tidak berhadapan dengan penguasa. Selain mengejar kemajuan ekonomi, *Asian values* seringkali dianggap dipertahankan demi kepentingan rezim otoriter di Asia. Selain *Asian values*, konsep ‘Negara Kekeluargaan’ yang diprakarsai Supomo dan tingkat tutur juga membentuk tradisi kritik di Indonesia.

Asian values yang menekankan otoritas kepemimpinan, kolektivitas masyarakat, dan harmonisasi untuk mencapai stabilitas politik justru menekan masyarakat untuk tidak bebas berekspresi; masyarakat menjadi terkekang dan harus selalu mengikuti aturan pemerintah. Hal ini membuat kritik terbuka terhadap pemerintah terkesan dilarang, sehingga para kritikus memilih metode yang lebih aman dan tidak terlalu berisiko. Simbol dan perumpamaan dalam seni, sastra, dan film digunakan sebagai medium kritik. Oleh karena itu, gaya kritik di Indonesia mungkin berbeda-beda tergantung konteks dan subjeknya.

Pendeknya, terdapat dualisme tradisi yang memengaruhi tradisi kritik Indonesia, yaitu tradisi kritik Barat yang ciri-cirinya dipengaruhi era Pencerahan Eropa dan tradisi kritik yang dipengaruhi *Asian values* dan otoritarianisme. Kritik terjadi akibat otoritarianisme penguasa. Jika pada masa Pencerahan di Barat kritik muncul akibat dogma agama yang muncul dari gereja dan otoritarianisme feodal, maka pada masa Orde Baru di Indonesia, kritik muncul akibat otoritarianisme pemerintahan yang represif dan militeristik. Kedua otoritarianisme ini menghambat kebebasan bergerak, berpendapat, berekspresi, dan berkreasi pada masa itu, sehingga masyarakat merasa tertekan dan cenderung dibungkam. Ketidakbahagiaan dan kegelisahan tersebut mendorong munculnya kritik terhadap penguasa otoriter dengan gayanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. *UNISIA No. 32, 17(4)*, 44–51. Diambil dari <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5857>
- Abdulsalam, H. (2017). Film sebagai Alat Propaganda Rezim Penguasa. Diambil 4 Juli 2022, dari <https://tirto.id/film-sebagai-alat-propaganda-rezim-penguasa-cxgY>
- Adawiyah, S. R., & Hartati, D. (2022).

- Perbandingan Karakter Tokoh Utama Si Kabayan Jadi Dukun Karya Moh. Ambri dengan Si Kabayan Karya Utuy Tatang Sontani. *Pena Literasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 85–99. Diambil dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/view/12229>
- Adhanugraha, R., & Putiamary, A. (2018). Perancangan Karakter Animasi 3D Si Kabayan yang Diadaptasi dari Buku Si Kabayan Versi Utuy Tatang Sontani. *e-Proceeding of Art & Design*, 5(3), 1832–1837. Diambil dari <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/147087/perancangan-karakter-animasi-3d-si-kabayan-yang-di-adaptasi-dari-buku-si-kabayan-versi-utuy-tatang-sontani.html>
- Agung, P. (2019). Kisah Hidup Sjumandjaja, Sineas Terkemuka pada Zamannya. Diambil 26 Juli 2022, dari <https://ceknricek.com/a/kisah-hidup-sjumandjaja-sineas-terkemuka-pada-zamannya/7798>
- Andanaprawira, Y. (2016). Analisis Karakter Tokoh Novel Si Kabayan: Komedi Satu Babak Karya Utuy Tatang Sontani dengan Teori Struktural sebagai Bahan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Madrasah Tsanawiyah 2016. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 10(27), 121–128.
- Anderson, E. A. (1993). Speech levels: The case of Sundanese. *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*, 3(2), 107–136. <https://doi.org/10.1075/prag.3.2.01and>
- Arday, S. M. (1985). In Memoriam: Sjumandjaja, (1934-1985). *Indonesia*, (40), 122–126. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/3350878>
- Ardayaneswari, I. (2019). Liku Jalan Sjumandjaja, Dari Senen hingga Uni Soviet. Diambil 26 Juli 2022, dari <https://tirto.id/liku-jalan-sjumandjaja-dari-senen-hingga-uni-soviet-ed7b>
- Aveling, H. (1969). An analysis of Utuy Tatang Sontani's "Suling." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 125(3), 328–343. Diambil dari https://brill.com/view/journals/bki/125/3/article-p328_2.xml
- Aveling, H. (1979). *Man and society in the works of the Indonesian playwright Utuy Tatang Sontani* (Southeast Asia Paper No. 13). Honolulu. Diambil dari <http://hdl.handle.net/10125/19385>
- Barker, T. A. C. (2011). *A Cultural Economy of the Contemporary Indonesian Film Industry*. National University of Singapore.
- Bodden, M. (2012). Dynamics and tensions of LEKRA's modern national theatre, 1959–1965. In J. Lindsay & M. H. T. Liem (Ed.), *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965* (hal. 453–484). Singapore: Brill. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h2v2.22>
- Chandra, M. (2022, Januari 24). High Context dan Low Context Communication di Indonesia, Kamu Termasuk yang Mana? Diambil 16 Oktober 2022, dari <https://praxis.co.id/stories/read/354/High-Context-dan-Low-Context-Communication-di-Indonesia-kamu-Termasuk-yang-Mana->
- Chudori, L. S. (2019). Cinta Segitiga yang Tak Pernah Selesai. Diambil 26 Juli 2022, dari <https://kolom.tempo.co/read/1217585/cinta-segitiga-yang-tak-pernah-selesai>
- Editor Indonesia Investments. (2015, Agustus 4). Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter. *Indonesia Investments*. Diambil dari <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180>
- Freeman, M. (1996). Human rights, democracy and 'Asian values.' *The Pacific Review*, 9(3), 352–366. <https://doi.org/10.1080/09512749608719191>
- Hanan, D. (2010). Innovation and Tradition in Indonesian Cinema. *Third Text*, 24(1), 107–121. <https://doi.org/10.1080/09528820903488984>
- Hanan, D. (2017). *Cultural Specificity in Indonesian Film: Diversity in Unity*. London: Palgrave Macmillan.
- Hasanah, M. (2019). Kontestasi Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991-1999. *Jurnal PolGov*, 1(2), 299–328. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.60198>
- Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 37(2), 251–275. <https://doi.org/10.1080/14672710500106341>
- Imanda, T. (2014). The State Market and the Indonesian Film Industry. In L. Giukin, J. Falkowska, & D. Desser (Ed.), *Small Cinemas in Global Market: Genres,*

- Identities, Narratives* (hal. 171–187). Washington DC: Lexington Books.
- Isabela, M. A. C. (2022). Mengapa Komunisme Dilarang di Indonesia? Diambil 25 Juni 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/00000071/mengapa-komunisme-dilarang-di-indonesia->
- Joris, C. A. (2012). The Artistic, The Commercial, and The Prolific (1970s - 1980s). In *A Brief Cultural History of Indonesian Cinema* (hal. 85–120). Jakarta: Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (1986). *Ungkapan-ungkapan filsafat sejarah Barat dan Timur: Penjelasan berdasarkan kesadaran sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kristina. (2021). G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya. Diambil 27 Juni 2023, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belakangnya>
- Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 ‘Golden Indonesia.’ *Citizenship, Social and Economics Education*, 14(2), 148–156. <https://doi.org/10.1177/2047173415597143>
- Mukhaer, A. A. (2021). Rentetan Praktik Pembredelan pada Media Massa oleh Orde Baru. Diambil 25 Juni 2022, dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/132752315/rentetan-praktik-pembredelan-pada-media-massa-oleh-orde-baru?page=all>
- Nasehat untuk Tinggal di Indonesia. (2023). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/tinggal-kerja/tip/item299>
- Nurilah, D. (2015). Mengenang Sjaman Djaya, Sutradara di Balik Penulisan Buku “AKU.” Diambil 26 Juli 2022, dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2285834/mengenang-sjaman-djaya-sutradara-di-balik-penulisan-buku-aku>
- Parahita, G. D. (2022). Dari ‘AADC’ hingga ‘Yuni’: bagaimana kritik sosial dalam film Indonesia berevolusi? Diambil 26 Juni 2022, dari <https://theconversation.com/dari-aadc-hingga-yuni-bagaimana-kritik-sosial-dalam-film-indonesia-berevolusi-180441>
- Permana, R. S. M., Darsa, U. A., & Sumarlina, E. S. N. (2023). Keterkaitan Antara Pencerahan di Eropa dan Tradisi Kritik Barat. *KABUYUTAN: Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal*, 2(3), 216–224. Diambil dari <https://ejournal.lintasbudayanusantara.net/index.php/kabuyutan/article/view/199>
- Putri, V. K. M. (2021). Teori Integralistik Menurut Soepomo. Diambil 23 Juni 2023, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo>
- Rahayu, L. M. (2016). Reinterpretasi dan Rekonstruksi Cerita Si Kabayan dan Sangkuriang dalam Kesusastraan Indonesia Modern. *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra*, 8(2), 261–274.
- Robison, R. (1996). The politics of ‘Asian values.’ *The Pacific Review*, 9(3), 309–327. <https://doi.org/10.1080/09512749608719189>
- Rosidi, A. (1966). *Dur Pandjak*. Bandung: CV. Pusaka Sunda.
- Said, S. (1991). *Pantulan Layar Putih: Film Indonesia Dalam Kritik Dan Komentar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Said, S. (1992). The Rise of the Indonesian Film Industry. *East-West Film Journal*, 6(2), 99–115.
- Sasono, E. (2008). The sketches of Jakarta in Indonesian films. *Karbon Journal*, 1–9. Diambil dari https://www.academia.edu/2214631/The_sketches_of_Jakarta_in_Indonesian_films?auto=citations&from=cover_page
- Sen, K. (1994). *Indonesian Cinema: Framing The New Order*. London: Zed Books Ltd.
- Sen, K. (2013). The people’s culture: Sjaman Djaja, a film-maker as social critic. Diambil 20 Juli 2022, dari <https://www.insideindonesia.org/the-people-s-culture-sjaman-djaja-a-film-maker-as-social-critic>
- Setiadi, E. (2018). *Peranan Soepomo Dalam Merumuskan Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia*. Universitas Islam Negeri “SMH” Banten. Diambil dari <https://repository.uinbanten.ac.id/3142/>
- Suharto, P. (2017). Hasil Diskusi Klub Baca Badan Bahasa: Lekra dan Geger. Jakarta: Badan Bahasa.
- Supartono, A. (2001). Rajawali Berlumur Darah: Karya-Karya Eksil Utuy Tatang Sontani. Edi Cahyono’s Experience. Diambil dari <https://fdokumen.com/document/rajawali-berlumur-darah-karya-karya-eksil-utuy-tatang-utuy-lahir-dari-keluarga.html?page=1>

- Susetiawan. (1997). Harmoni, Stabilitas dan Kritik Sosial. *UNISIA No. 32, 17(4)*, 3–16. Diambil dari <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5853>
- Suwarna, D., & Yusar, D. (2019). Sastra Lekra dalam Estetika dan Ekspresi Penciptaan: Menilai Utuy Tatang Sontani. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana, 25(1)*, 29–40. <https://doi.org/10.33751/wahana.v25i1.1216>
- Suwarno, B., & Yanwar, A. P. (2020). Speech Level in Some Indonesian Regional Languages and Implication for Conservation. In A. Wardana, Aman, & A. N. P. Nugroho (Ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)* (hal. 328–332). Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.066>
- Teguh, I. (2021, Juli 19). Sjumlah Djaya & Film Atheis: Dilarang Sebab Aparat Tak Paham Konteks. Diambil 17 Agustus 2022, dari <https://tirto.id/sjumlah-djaya-film-atheis-dilarang-sebab-aparat-tak-paham-konteks-edbL>
- Teik, K. B. (1999). The value(s) of a miracle: Malaysian and Singaporean elite constructions of Asia. *Asian Studies Review, 23(2)*, 181–192. <https://doi.org/10.1080/10357829908713230>
- Ulum, M. B., & Hamida, N. A. (2018). Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia. *Constitutional Review, 4(1)*, 111–130. Diambil dari <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/view/415>
- Vickers, A., & Fisher, L. (1999). Asian Values in Indonesia? National and Regional Identities. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 14(2)*, 382–401. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/41057002>
- Wajdi, M. (2015). Do speech levels exist in Indonesian? Diambil 23 Juni 2023, dari <https://hajrabali.wordpress.com/2015/08/28/do-speech-levels-exist-in-indonesianseminar-internasional-bahasa-dan-sastra-austronesia-dan-non-austronesia-7/>
- Wulandari, S., & Kusmarwanti. (2022). Pesan Kritik Sosial dalam Film Sejuta Sayang Untuknya. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies, 2(1)*, 1–15.